



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 392/DISDIK-C/IX / 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU
AR-ROYAN KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan administratif serta peninjauan di lapangan atas permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu Ar-Royan telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon agar dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diberikan izin pendirian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Memperhatikan

: Permohonan Ketua Yayasan Imam Mughil Nomor 001/II/YIM/2013 tanggal 22 Februari 2013 Perihal Permohonan Ijin Operasional Play Group dan TK.

: Memeriksa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu
Ar-Royan Kabupaten Kayong Utara.

1. Penanggung : Khoirul Mardi

Jawab/Pengelola

2. Alamat

: Dusun Simpang Empat Desa

Pangkalan Buton Kec Sukadana

: Nomor 02 Tahun 2012 tentang

Pendirian Yayasan Imam Mughbil

yang dibuat dihadapan Notaris

Agus Endah Kasulityaningrom,

S.H., M.Kn.

: Swasta

5. Jenis Layanan : a. Kelompok Bermain; dan

Pendidikan

b. Taman Kanak-kanak.

: Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan

untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

: Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku

selama Lembaga Pendidikan melaksanakan pendidikan dan

pengajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

: Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan

penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Bupati

melalui Dinas Pendidikan.

: Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA, pengelola/penanggung jawab dapat diberikan

sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan

pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

: Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan evaluasi oleh

Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam

setahun.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH

KEENAM

KELIMA

KEEMPAT

KETIGA

KEDUA



Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 9 September 2014

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI OLEH

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KAYONG UTARA

Tanggal 9/9-14

Paraf